

**PENGANIAYAAN SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT KARENA ISTRI TRAUMA
KEPADA SUAMI**

**(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor
546/Pdt.G/2021/PA.Bpp)**

Oleh:

MUAFI IZZUDIN

E1A019347

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Bpp dan bagaimana akibat hukum cerai gugat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian Preskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai gugat akibat adanya penganiayaan terhadap istri pada perkara Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Bpp mendasarkan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Menurut peneliti dalam perkara tersebut terdapat fakta hukum berupa adanya tindakan pidana yaitu penganiayaan dengan memukul penggugat menggunakan benda-benda keras, sehingga Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat menambahkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) KHI. Akibat hukum dari adanya cerai gugat dalam putusan ini terdapat 2 (dua) hal, yaitu pada para pihak dan terhadap anak. Akibat hukum terhadap para pihak yaitu berupa talak satu *ba'in shughra* yaitu bekas suami dan bekas istri tidak dapat rujuk kembali tapi boleh melangsungkan perkawinan kembali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan akibat hukum terhadap anak yaitu jatuhnya hak asuh anak kepada istri dan berhak atas biaya hadhanah yang diberikan oleh suami karena anak tersebut masih berumur 12 tahun dan 5 tahun atau belum *mumayyiz*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: *Perceraian, Penganiayaan, Akibat Hukum*

**MALTREATMENT AS A REASON FOR DIVORCE BECAUSE THE WIFE IS
TRAUMATIZED BY HER HUSBAND**

**(Juridical Review of the Decision of the Balikpapan Religious Court Number
546/Pdt.G/2021/PA.Bpp)**

By:

Muafi Izzudin

EIA019347

ABSTRAK

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and lasting family based on the Almighty God. Because the purpose of marriage is to form a happy, lasting, and prosperous family, the Law adheres to the principle of making divorce difficult, to allow divorce there must be certain reasons and must be carried out in front of a Court Session.

This research aims to find out how the legal considerations of judges in deciding divorce cases against Balikpapan Religious Court Decision Number 546/Pdt.G/2021/PA.Bpp and how the legal consequences of contested divorce. This research uses the Normative Juridical approach method with Prescriptive research specifications. The data source used is secondary data obtained from literature study. The data is presented in the form of narrative text using qualitative normative analysis.

The results showed that the Panel of Judges in their decision to grant the request for a divorce due to mistreatment of the wife in case Number 546/Pdt.G/2021/PA.Bpp based on the Explanation of Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage jo Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 jo Article 116 letter (f) KHI. According to the researchers, in this case there are legal facts in the form of criminal acts against the body, namely persecution by hitting the plaintiff using hard objects, so that the panel of judges in their legal considerations can add the Explanation of Article 39 paragraph (2) letter (d) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 19 letter (d) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (d) KHI. The legal consequences of a contested divorce in this decision are 2 (two) things, namely to the parties and to the child. The legal consequences for the parties are in the form of divorce one ba'in shughra, namely the former husband and former wife cannot reconcile but may remarry with a new marriage contract even during the iddah period, this is in accordance with the provisions of Article 119 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. While the legal consequences for children are the fall of child custody to the wife and are entitled to hadhanah fees provided by the husband because the child is still 12 years old and 5 years old or not yet mumayyiz. This is in accordance with the provisions of Article 105 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Divorce, Maltreatment, Legal Consequences